



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya kritisi masyarakat luas terhadap kinerja instansi pemerintah, terutama dalam masa era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, merupakan salah satu indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mengakomodasikan partisipasi stakeholder secara berimbang (Good Governance).

Paradigma lama bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dengan kemampuan internal dalam menggunakan anggaran secara tidak relevan.

Menanggapi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja dalam Rangka Memberi Arahan kepada Semua Instansi Pemerintah untuk Menyiapkan Lkip sebagai bagian Integral dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang Utuh yang dituangkan dalam suatu system akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang mendatang.

B. KEDUDUKAN

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Perubahan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 18 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Dan terjadi perubahan PERDA dan PERGUB dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2016, berdasarkan PERDA No 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, sehubungan dengan maksud LKIP ini disusun, perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Mempunyai tugas pokok yaitu :

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta peningkatan sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan aparatur ;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan informasi dibidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga ;
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha kecil dan menengah ; dan
5. Penyelenggaraan urusan ke sekretariatan Dinas.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unsur organisasi dengan unsur organisasi dinas yang terdiri dari :

- Unsur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - Pimpinan adalah Kepala Dinas,
 - Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Dinas,
 - Pelaksana adalah Kepala Bidang, dan UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional
- Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - Kepala Dinas
 - Sekretariat
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagaian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
 - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan

- Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
- Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
- Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - Seksi Fasilitasi, Permodalan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
- Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
 - Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- Jabatan Fungsional
- UPTD Balai Perkoperasian dan UMKM
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi
 - Seksi Penyelenggaraan

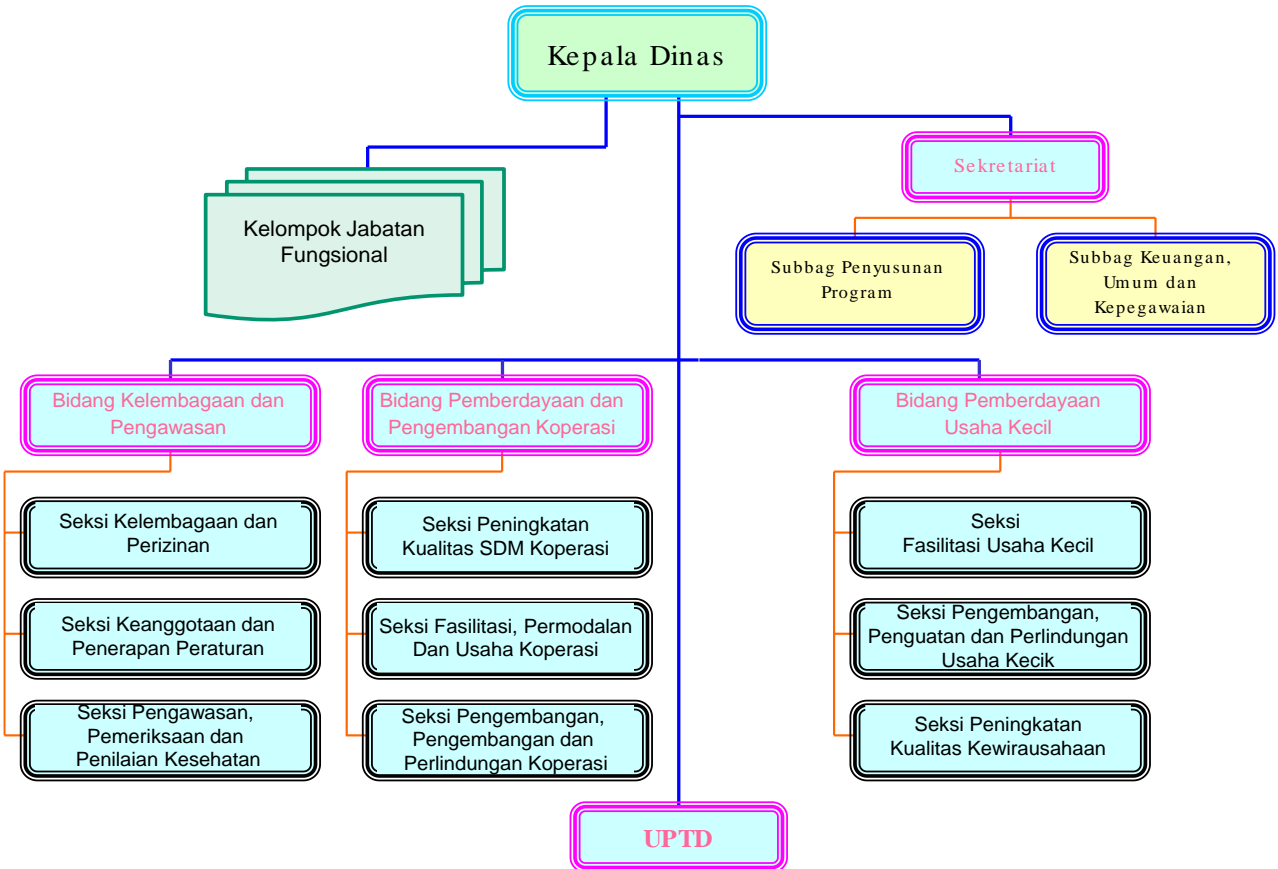
Optimalisasi Fungsi Institusi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan karena memegang peran penting dan strategis dalam mengatasi berbagai sektor Perkoperasian dan UMKM yang berkembang, yang menjadi tugas pokok dinas merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, pelaksana fungsi dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing, Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugas

pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan.

E. LINGKUNGAN STRATEJIK ORGANISASI

Berbagai kegiatan operasional dan pembinaan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bidang yang memiliki kompleksitas, karena berkaitan langsung dengan pengusaha / pelaku usaha dan masyarakat / UMKM adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Ketidakseimbangan antara kepentingan individu, pelaku usaha dengan UMKM akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sendiri. Oleh karena itulah kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait, Akademisi, asosiasi dan pelaku usaha perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut maka dapat dirumuskan aspek strategi yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) internal Daerah dan peluang (opportunities) serta tantangan (threats) yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1) Kelembagaan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Dinas di Provinsi
- 1 (satu) unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan;
- 14 (empat belas) kelembagaan Koperasi dan UKM di Kabupaten/kota

2) Jumlah personil/karyawan (ASN dan non ASN) yang mendukung tugas dan fungsi adalah :

No	Klasifikasi	Uraian	PNS	CPNS	Non PNS	Jumlah
1.	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	35	1	10	46
		Perempuan	29	1	3	33
2.	Menurut Pendidikan	S3	-	-	-	-
		S2	4	-	-	3
		S1	34	2	5	41
		D.III	4	-	1	5
		D.II	-	-	-	-
		D.I	-	-	-	-
		SLTA	25	-	4	29
		SLTP	-	-	1	1
		SD	-	-	-	-
3.	Menurut Agama	Islam	25	1	4	30
		Kristen	37	1	7	45
		Katolik	2	-	-	2
		Hindu	-	-	-	-

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai/personil dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Tengah sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 46 orang (51,90 persen), S2 sebanyak 3 orang (3,80 persen), D.III sebanyak 5 orang (6,33 persen), SLTA sebanyak 29 orang (36,71 persen) dan SLTP sebanyak 1 orang (1,26 persen), terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 62 Orang
- Honorer : 22 Orang

3) Sarana dan prasarana kelembagaan pendukung yang memadai kelemahan (waeknesses) dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan penembangan.
2. Terbatasnya dan belum meratanya kesempatan pengembangan bagi pejabat/petugas untuk mengembangkan kemampuan serta masih rendahnya kapabilitas.
3. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terakit.
4. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pembinaan

Kemudian aspek strategi eksternal yang merupakan peluang (oppurtinities) dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Rencana Strategis Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) yang menempatkan pembangunan Koperasi dan UMKM adalah program pokok dan prioritas untuk dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah.

2. Keberadaan kelembagaan unit pelaksanaan (UPT) yang mendukung program/kegiatan pembangunan koperasi dan UMKM.
3. Dukungan penyuluhan perkoperasian, pendampingan Koperasi dan UKM dan petugas lapangan.

Sedangkan aspek strategi eksternal yang merupakan Ancaman (threats) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatnya jumlah usaha sejenis sehingga terjadinya peningkatan persaingan;
2. Tingginya jumlah toko modern dan pusat perdagangan di Kota ;
3. Infrastruktur tidak memadai sehingga mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan pokok;
4. Tantangan Pasar Global melalui ACFTA Tahun 2010 dan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015;
5. Keterbatasan Infrastruktur industri Kreatif
6. SDM Koperasi UKM belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2016.

A. VISI DAN MISI

a. Visi

Selaras dengan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Yaitu :

Kal-Teng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kal-Teng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis

Seperti yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016 – 2021, arah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) ditunjukan pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Usaha Mikro Anggota Koperasi yang berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan

UMKM dan Koperasi ditunjukkan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Koperasi dan UMKM. Di sisi lain, pembangunan koperasi dan UMKM ditunjukkan pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro anggota Koperasi dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai indikator pembangunan dalam bentuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.

Selaras dengan itu, Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan menjadi instansi profesional di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap meletakkan profesionalisme dan martabat serta pemberdayaan Koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai landasan organisasi.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan di atas, maka dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke 4 yaitu **"Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan Kemiskinan"**. Misi tersebut memiliki tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro dan Anggotanya dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal tersebut dijabarkan, yaitu :

1. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang kuat, adalah dalam arti partisipasi anggota dengan Koperasi sebagai badan usaha koperasi yang dicirikan oleh prinsip – prinsip kohensivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial ;

2. Mewujudkan koperasi dan UMKM yang sehat, adalah dalam arti kinerja usaha, prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi rentabilitas dan liquiditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi ;
3. Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri, adalah dalam arti kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri. Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah, maka anggota – anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang ingin merugikan kepentingan anggotanya ;
4. Mewujudkan koperasi dan UMKM yang tangguh, adalah dalam arti internalisasi dan penguatan nilai – nilai dan prinsip – prinsip koperasi dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang tangguh dalam penguatan jati diri koperasi.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai **Misi** yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan di atas, maka dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke 4 Gubernur dan Wakil; Gubernur Kalimantan Tengah, **”Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan Kemiskinan”**. yaitu :

1. Mewujudkan Kelembagaan Koperasi yang Sehat dan Berkualitas ;
2. Mewujudkan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan ;
3. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan.

Sedangkan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian tersebut.

B. TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

a. Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah kedepan dengan memformulasikan tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut perumusan tujuan tersebut diuraikan :

1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan; tujuan pertama ini, Terwujudnya kinerja dan tata kelola koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel, dengan menekankan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan peningkatan tata kelola dan kinerja koperasi, dalam arti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diembannya bergantung pada perbaikan kinerja dan tata kelola koperasi.
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan pengentasan kemiskinan; tujuan kedua, mewujudkan koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan

pengangguran. Dengan upaya mendorong koperasi dan UMKM salah satu pilar utama dan kekuatan menopang ekonomi masyarakat dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

3. Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi; tujuan ketiga, memfokuskan pada perbaikan internal kinerja Dinas, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja. Penetapan sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

• Sektor Koperasi dan UMKM

- 1) Meningkatnya jumlah Koperasi yang berkualitas.
- 2) Meningkatnya kinerja KSP/USP-Koperasi Tingkat Provinsi dan Kab/kota.
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi.

- 4) Terlaksananya lomba tangkas terampil Tingkat Provinsi dan Nasional.
- 5) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi para pengelola kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dalam pembuatan badan hukum koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang perkoperasian.
- 6) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman positif masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.
- 7) Meningkatnya kinerja KSP-USP-Koperasi Tingkat Provinsi dan kab/kota.
- 8) Meningkatnya kinerja koperasi di 39 desa/kelurahan PM2L.
- 9) Tersedianya akurasi data UMKM/Wirausaha se Kalimantan Tengah.
- 10) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM dalam melakukan pengembangan usahanya.
- 11) Meningkatnya promosi/publikasi hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah.
- 12) Meningkatnya kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan laporan keuangan koperasi, meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para pengelola/pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP-Koperasi, Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para aparatur pembina koperasi dalam penilaian terhadap kesehatan KSP/USP-Koperasi, Meningkatnya jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dan ketentuan dalam penyusunan LKIP, dimanifestasikan melalui

perumusan dan penetapan aspek-aspek yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Bidang Sektor	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama
Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pengelola KSP/USP-Koperasi dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengelola KSP/USP yang mampu menyusun laporan keuangan (orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan dana KUR oleh Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persen dana KUR yang tersalurkan ke Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah (%)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dan terlaksananya peraturan perundang-undangan/perda dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan KUMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis peraturan yang disepakati yang berpihak pada pemberdayaan KUMKM (Dokumen)
	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya keselarasan program dan kegiatan di tingkat pusat, pusat, provinsi, kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Singkronisasi dan harmonisasi serta sinergitas program dan kegiatan di tingkat Kementerian, pusat, provinsi, kabupaten/kota

	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya wirausaha baru di kalangan sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarjana baru di kalangan sarjana (Orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan/modul untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan/modul Kewirausahaan (Modul)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah/kelompok masyarakat yang memahami kewirausahaan (Orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya lomba Tangkas Terampil Tingkat Provinsi dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Tangkas Terampil Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi para kelompok ekonomi produktif dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya kelompok ekonomi produktif dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya (Koperasi)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman positif masyarakat tentang perkoperasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya pengetahuan koperasi di masyarakat (Orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyuluhan koperasi di Desa/Kelurahan PM2L 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi yang mendapat penyuluhan (Unit)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kelembagaan koperasi di Kalimantan Tengah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah koperasi berkualitas (Koperasi)
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kinerja KSP/USP-Koperasi Tingkat provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja KSP/USP-Koperasi (Unit)

d. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Trategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2016 (Rp 000)
1	2	3	4	5
			1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas	• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas dari Tahun 2010	• 100 Koperasi	• Peningkatan Koperasi	• Rp. 150.000
	• Jumlah Koperasi aktif	• 3.220 Koperasi	• Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi	• Rp. 415.170
	• Jumlah Terbentuknya Koperasi	• 12 Koperasi • 12 Kelompok Tani	• Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Pangan • Penyuluhan perkoperasian di wilayah pangan	• Rp. 41.700 • Rp 99.300
	• Jumlah Kab/kota dan Desa/Kelurahan yang mendapat penyuluhan perkoperasian	• 42 Desa/Kel • 14 kab/kota	• Penyuluhan Perkoperasian Di Wilayah Desa/Kelurahan PM2L • Sosialisasi PM2L	• Rp. 316.630,880 • Rp. 61.616

	<ul style="list-style-type: none"> Berkembang dan Tumbuhnya koperasi di wilayah pesisir/ Masyarakat Nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> 20 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Koperasi Nelayan / Masyarakat Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 60.000
2. Meningkatkan kinerja KSP/USP-Koperasi Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KSP/USP-koperasi Tingkat Provinsi dan KAb/Kota yang meningkat kinerjanya 	<ul style="list-style-type: none"> 50 Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 58.000
3. Meningkatkan jumlah koperasi yang berprestasi dan kinerja koperasi serta berdaya saing usaha sesuai jati dirinya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Koperasi Aktif yang berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Koperasi Berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 149.970
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT(Rapat Anggota Tahunan) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800 Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kelambagaan Koperasi Melalui RAT 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 75.000
4. Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 42 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> Tangkas Terampil Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 133.150
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para Pengelola kelompok	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Bidang Perkoperasian 	<ul style="list-style-type: none"> 30 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 87.500

usaha ekonomi produktif Perempuan dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang perkoperasian	• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya	• 30 Orang	• Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi	• Rp. 65.000
6. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman positif masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM	• Jumlah Leaflet Perkoperasian	• 6.230 Lembar	• Pembuatan Leaflet Perkoperasian	• Rp. 25.000
			2. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	
7. Meningkatnya kinerja koperasi di desa / kelurahan PM2L	• Jumlah koperasi yang usahanya meningkat	• 42 Koperasi	• Monitoring dan evaluasi koperasi di desa / kelurahan PM2L	• Rp. 154.530

8. Tersedianya Akurasi Data UMKM / Wirausaha se Kalimantan Tengah	• Jumlah UMKM se Kalimantan Tengah	• 14 Kab/Kota	• Pemetaan UMKM	• Rp. 175.000
9. Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahanya	• Jumlah koperasi dan UKM yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan usahanya	• 50 Koperasi dan UMKM	• Monev Fasilitas Bantuan perkuatan Permodalan	• Rp. 70.000
		• 4 unit	• Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha	• Rp. 268.737
			3. Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	
10. Meningkatkan kemampuan UMK sebagai pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan Usahanya	• Jumlah Jumlah UMK yang mengembangkan usahanya	• 12 UMK • 42 Orang	• Pendampingan UMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) • Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM	• Rp.147.452,12 • Rp. 85.000
			4. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	
11. Meningkatkan promosi / publikasi	• Jumlah UMKM yang mengikuti pameran luar	• 18 KUMKM	• Pameran luar daerah	• Rp. 200.000

dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah	daerah			
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UMKM yang mengikuti pameran dalam daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 KUMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pameran dalam daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 50.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lokasi pasar rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 130.996
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran Kalteng Expo 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 KUMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pameran Kalteng Exspo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 140.000
			5. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	
12. Meningkatkan kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan laporan keuangan Koperasi, Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan para pengelola /	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kemampuan, pengetahuan dalam mengembangkan usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> • 490 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 2.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengelola / pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 62.500

<p>pengurus Koperasi dalam mengelola Manajemen KSP/ USP Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para Aparatur pembina koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP Koperasi, Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat</p>	<p>• Jumlah pengelola koperasi yang paham tentang perkoperasian</p>	<p>• 84 Orang</p>	<p>• DIKLAT Perkoperasian</p>	<p>• Rp. 284.673</p>
			<p>6. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM</p>	
<p>13. Meningkatnya Informasi Produk Unggulan UMKM Daerah melalui Media</p>	<p>• Jumlah media promosi dan publikasi bagi UMKM</p>	<p>• 6.240 Lembar</p>	<p>• Promosi dan Publikasi</p>	<p>• Rp. 25.000</p>

14. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil	• Jumlah UMKM Penerima Bantuan Peralatan dan Sarana Usaha dalam Mengembangkan Usahanya	• 59 Unit	• Peningkatan Peran UMK Dalam Pengembangan Usahanya	• Rp. 760.000
JUMLAH				Rp. 6.366.925

PGORAM DAN KEGIATAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

-

2. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

- Koordinasi Perencanaan Penyusunan Program/Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Rp. 128.257.000,-

- Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM

Rp. 105.100.000,-

3. Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif

- Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP Koperasi

Rp. 268.737.000,-

4. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

-

5. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

-

6. Program Peningkatan Daya Saing UMKM

- Informasi UMKM

Rp. 50.000.000,-

- o Temu Kemitraan UMKM

Rp. 50.000.000,-

Total Anggaran Tahun 2016 untuk Program Prioritas berjumlah Rp. 6.894.019.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Tabel 2.3 Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas	• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	100
		• Jumlah Koperasi aktif	Koperasi	1.610
		• Jumlah Terbentuknya Koperasi	Koperasi	12
			Kelompok Tani	12
		• Jumlah Kab/kota dan Desa/Kelurahan yang mendapat penyuluhan perkoperasian	Desa/Kelurahan	39
			Kabupaten/Kota	14
2.	Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi dan kinerja koperasi serta berdaya saing usaha sesuai jati dirinya	• Jumlah Koperasi Aktif yang berprestasi	Koperasi	12
		• Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT(Rapat Anggota Tahunan)	Koperasi	340
3.	Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	• Jumlah Peserta tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	Orang	42
4.	Meningkatnya pengetahuan dan	• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi	Orang	30

	pemahaman bagi para Pengelola kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang perkoperasian	Produktif Perempuan di Bidang Perkoperasian		
		• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya	Orang	30
5.	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahanya	• Jumlah koperasi dan UKM yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan usahanya	Koperasi dan UMKM	50
			Unit	4
6.	Meningkatnya kemampuan UMK sebagai para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan Usahanya	• Jumlah UMK yang mengembangkan usahanya	UMK	12
			Orang	42
7.	Meningkatnya promosi / publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah	• Jumlah UMKM yang mengikuti pameran luar daerah	KUMKM	5
		• Jumlah UMKM yang mengikuti pameran dalam daerah	KUMKM	5
		• Jumlah lokasi pasar rakyat	Lokasi	1
		• Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran Kalteng Expo	KUMKM	8
8.	Meningkatnya kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan	• Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kemampuan,	Orang	455

	laporan keuangan Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para pengelola / pengurus Koperasi dalam mengelola Manajemen KSP/ USP Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para Aparatur pembina koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP Koperasi, Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat	pengetahuan dalam mengembangkan usahanya		
		• Jumlah pengelola / pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP koperasi	Orang	30
		• Jumlah pengelola koperasi yang paham tentang perkoperasian	Orang	84
9.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil	• Jumlah UMKM Penerima Bantuan Peralatan dan Sarana Usaha dalam Mengembangkan Usahanya	Unit	59

No	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Jasa Surat Menyurat	1.651.245.020,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.620.000,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.290.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.268.500,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	252.493.600,-
6.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	991.889.880,-
7.	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	136.295.000,-
8.	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	81.520.000,-
9.	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	306.312.000,-
10.	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	2.062.500.000,-
11.	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	629.580.000,-
JUMLAH		6.381.014.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat juga dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja kegiatan dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dari suatu instansi yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan proposional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Koperasi dan UMKM di daerah. Indikator umum keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan pada masyarakat akan tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Namun demikian, untuk tahun 2016 ini belum dilakukan survei atas seberapa jauh kepuasan yang diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan atas layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dapat dilakukan pengukuran sebagaimana tercantum dalam Bab ini.

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Trategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
• Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas	• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas	• 100 Koperasi	• 191 Koperasi	• 191 %
	• Jumlah Koperasi aktif	• 1.610 Koperasi	• 1.610 Koperasi	• 100 %
	• Jumlah terbentuknya koperasi	• 12 Koperasi	• 12 Koperasi	• 100 %
		• 12 Kelompok Tani	• 12 Kelompok Tani	• 100 %
	• Jumlah kab/kota dan desa/kelurahan yang mendapat penyuluhan perkoperasian	• 14 kab/kota • 39 desa/kel	• 14 kab/kota • 39 desa/kel	• 100 %
• Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi	• Jumlah Koperasi Aktif yang berprestasi	• 12 Koperasi	• 12 Koperasi	• 100%
	• Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	• 340 Koperasi	• 340 Koperasi	• 100%
• Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	• Jumlah Peserta tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	• 42 Orang	• 42 Orang	• 100%
• Meningkatnya	• Jumlah	• 30 Orang	• 30 Orang	• 100%

Pengetahuan dan Keterampilan para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Bidang Perkoperasian	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Bidang Perkoperasian			
	• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi dan Pengesahannya	• 30 Orang	• 30 Orang	• 100 %
• Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahannya	• Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Bantuan untuk Mengembangkan Usahanya	• 50 Koperasi dan UMK	• 50 Koperasi dan UMK	• 100%
		• 4 Unit	• 4 Unit	• 100%
• Meningkatnya Kemampuan UMK sebagai pelaku usaha UMK dalam mengembangkan usahanya	• Jumlah UMK yang mengembangkan Usahanya	• 12 UMK • 42 Orang	• 12 UMK • 42 Orang	• 100%
• Meningkatnya promosi / publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah	• Jumlah UMK yang mengikuti pameran luar daerah	• 5 KUMKM	• 5 KUMKM	• 100 %
	• Jumlah UMK yang mengikuti pameran dalam daerah	• 5 KUMKM	• 5 KUMKM	• 100 %
	• Jumlah KUMKM yang mengikuti pameran kalteng expo	• 8 KUMKM	• 8 KUMKM	• 100 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lokasi pasar rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan laporan keuangan Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para pengelola / pengurus Koperasi dalam mengelola Manajemen KSP/ USP Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para Aparatur pembina koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP Koperasi, Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kemampuan, pengetahuan dalam mengembangkan usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> • 455 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 455 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengelola / pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengelola koperasi yang paham tentang perkoperasian 	<ul style="list-style-type: none"> • 84 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 84 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UMKM penerima bantuan peralatan dan sarana usaha dalam mengembangkan usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> • 59 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> • 59 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

mengikuti Diklat				
---------------------	--	--	--	--

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Staregik SKPD Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas

Indikator	2015			2016		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas dari Tahun 2014	• 100 Koperasi	• 137 Koperasi	• 137 %	• 100 Koperasi	• 191 Koperasi	• 191 %
• Jumlah Koperasi aktif	• 2.000 Koperasi	• 2.405 Koperasi	• 120,25%	• 2.000 Koperasi	• 2.506 Koperasi	• 125,3%

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi yaitu meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas di Kalimantan Tengah mulai dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 3,71 % dari jumlah Koperasi per posisi 31 Desember 2016 berjumlah 3.296 unit dan koperasi aktif sampai dengan posisi 31 Desember 2016 berjumlah 2.506 unit. Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Persentase koperasi aktif tahun 2012 - 2016
Provinsi Kalimantan Tengah

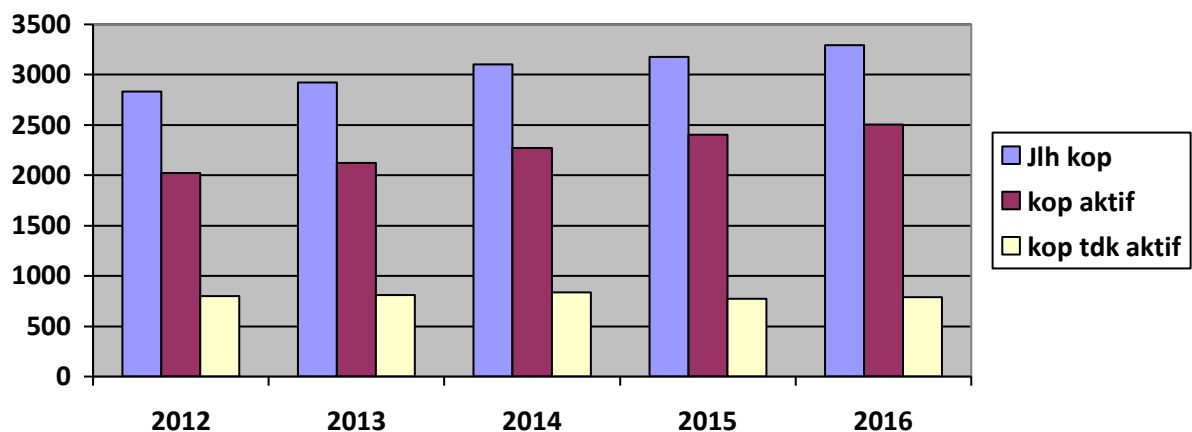
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	2.024	2.215	2.270	2.405	2.506
2	Jumlah koperasi	2.833	2.922	3.105	3.178	3.296
3	Persentase koperasi aktif	71,44	72.72	71.78	75.68	76.03

Persentase koperasi aktif tahun 2012 – 2016
Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Palangka Raya					
	Jumlah koperasi aktif	247	232	238	237	241
	Jumlah koperasi	367	264	270	269	273
	Persentase koperasi aktif	67,30	87,88	88,15	88,10	88,27
2	Kabupaten Kapuas					
	Jumlah koperasi aktif	270	296	338	314	335
	Jumlah koperasi	393	420	438	445	466
	Persentase koperasi aktif	68,70	70,48	77,17	70,56	76,18
3	Kabupaten Pulang Pisau					
	Jumlah koperasi aktif	95	95	115	126	132
	Jumlah koperasi	135	135	154	165	171
	Persentase koperasi aktif	70,37	70,37	74,67	76,36	77,19
4	Kabupaten Katingan					
	Jumlah koperasi aktif	134	109	71	100	111
	Jumlah koperasi	173	199	214	130	233
	Persentase koperasi aktif	77,46	54,77	33,18	76,92	47,63
5	Kabupaten Ktw.					

	Timur					
	Jumlah koperasi aktif	223	234	239	269	268
	Jumlah koperasi	310	320	325	357	370
	Persentase koperasi aktif	71,94	73,13	73,54	75,35	72,43
6	Kabupaten Gunung Mas					
	Jumlah koperasi aktif	155	168	174	185	191
	Jumlah koperasi	206	218	227	237	243
	Persentase koperasi aktif	75,24	77,06	76,65	78,05	78,60
7	Kabupaten Barito Timur					
	Jumlah koperasi aktif	122	82	90	117	117
	Jumlah koperasi	166	176	182	129	129
	Persentase koperasi aktif	73,49	46,59	49,45	90,69	90,69
8	Kabupaten Barito Selatan					
	Jumlah koperasi aktif	144	179	186	191	199
	Jumlah koperasi	180	204	211	215	223
	Persentase koperasi aktif	80,00	87,75	88,15	88,83	89,23
9	Kabupaten Barito Utara					
	Jumlah koperasi aktif	132	158	183	203	209
	Jumlah koperasi	215	236	259	267	273
	Persentase koperasi aktif	61,40	66,95	70,66	76,02	76,55
10	Kabupaten Murung Raya					
	Jumlah koperasi aktif	37	47	28	34	27
	Jumlah koperasi	86	96	91	61	69
	Persentase koperasi aktif	43,02	48,96	34,56	55,73	39,13
11	Kabupaten Seruyan					

	Jumlah koperasi aktif	130	163	206	214	230
	Jumlah koperasi	166	199	246	266	282
	Persentase koperasi aktif	78,31	81,91	83,74	80,45	81,56
12	Kabupaten Ktw. Barat					
	Jumlah koperasi aktif	168	186	198	205	213
	Jumlah koperasi	226	236	248	357	261
	Persentase koperasi aktif	74,34	78,81	79,84	55,85	39,13
13	Kabupaten Lamandau					
	Jumlah koperasi aktif	86	91	108	108	126
	Jumlah koperasi	112	117	129	138	158
	Persentase koperasi aktif	76,79	77,78	84,38	78,26	79,74
14	Kabupaten Sukamara					
	Jumlah koperasi aktif	51	51	55	60	61
	Jumlah koperasi	55	55	59	64	66
	Persentase koperasi aktif	92,73	92,73	93,22	93,75	92,42
15	Provinsi					
	Jumlah koperasi aktif	30	34	41	42	46
	Jumlah koperasi	43	47	52	48	52
	Persentase koperasi aktif	69,77	72,34	78,85	87,5	88,46
	Total Provinsi kab/kota					
	Jumlah total koperasi aktif	2.024	2.125	2.270	2.405	2.506
	Jumlah total koperasi	2.833	2.922	3.105	3.178	3.296
	Total Persentase koperasi aktif	71,44	72,72	73,11	75,68	76,03



Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

b. Sasaran 2 :

Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Berprestasi dan Kinerja Koperasi serta Bedaya Saing Usaha Sesuai Jati Dirinya

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan jumlah koperasi berprestasi tahun 2012 s/d 2016 dan secara umum koperasi mengalami perkembangan, baik dari segi usaha maupun kelembagaan. Meskipun masih cukup terbilang banyak koperasi yang tidak aktif. Pencapaian sasaran ini juga diupayakan untuk meningkatnya jumlah masyarakat di Tengah mengerti dan paham peranan koperasi dalam perekonomian di perdesaan serta pemahaman positif tentang keberadaan koperasi sekarang ini.

Persentase koperasi aktif tahun 2012-2016
Prov. Kalteng

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	2.024	2.215	2.270	2.405	2.506
2	Jumlah koperasi	2.833	2.922	3.105	3.178	3.296
3	Persentase koperasi aktif	71,44	72.72	71.78	75.68	76.03

c. Sasaran 3 :

Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk.Provinsi dan Nasional

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan jumlah siswa dalam mengembangkan pemahaman para siswa/SLTA memahami perkoperasian dan UMKM yang diikuti oleh siswa SLTA/SMK se Kalimantan Tengah.

d. Sasaran 4 :

Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman bagi para pengelola kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dalam pembuatan badan hukum koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang koperasi

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan jumlah kelompok usaha yang produktif mengerti dan paham dalam proses pembuatan badan hukum koperasi dan pengesahanya serta meningkatkan keterampilan di bidang koperasi.

Serta untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausawan; Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal; Meningkatkan pendapatan.

e. Sasaran 5:

Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahanya

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kinerja koperasi dalam melakukan pengembangan usahanya, meningkatkan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk yang dimiliki sehingga mampu bersaing di pasar dan memiliki daya saing serta memiliki legalitas di mata hukum. UMK/UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah, begitu juga

dengan Negara Indonesia UKM ini Sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah.

f. Sasaran 6 dan 9 :

Meningkatnya Kemampuan UMK sebagai Para Pelaku Usaha UMKM dalam Mengembangkan Usahanya dan Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk mambantu para pelaku usaha / masyarakat dalam mengembangkan usahanya, serta mampu menciptakan usaha baru dengan terciptanya unit – unit usaha baru.

Usaha Kecil adalah Peluang Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha mikro yaitu memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300juta/tahun. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki aset >Rp 50 juta - Rp 500 juta dengan omset >Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar/tahun. Sedangkan, usaha menengah memiliki aset > Rp 500 juta – Rp. 10 miliar dengan omset >Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar/tahun.

Dalam tahun 2015 dilakukan pemetaan UMKM se Kalimantan Tengah dan sampai tahun berikutnya masih dilakukan pendataan secara

menyeluruh di 14 kab/kota dimana perposisi 31 Desember 2016 jumlah UMKM 31.033 UMKM dimana data ini masih akan terus mengalami perubahan.

Jumlah UMKM Tahun 2016 Berdasarkan Sektor Usaha
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Uraian	Hotel / Dagang /Rmh Makan	Indurs tri Pengol ahan	Pertani an/ Perkeb unan/ Perikan an	Perta mba ngan	Ang kut an	Ban gun an/ Kon tru ksi	Persew aan	Jasa
1	Kota Palangka Raya	4.697	241	390	8	100	14	150	1.050
2	Kabupaten Kapuas	92	16	22	0	4	2	2	12
3	Kabupaten Pulang Pisau	172	4	19	0	7	3	8	48
4	Kabupaten Katingan	1.320	72	303	2	41	0	8	151
5	Kabupaten Ktw. Timur	844	39	85	1	50	18	17	143
6	Kabupaten Gunung Mas	2.241	74	576	0	0	0	3	231
7	Kabupaten Barito Timur	1.106	46	374	0	1	2	12	111
8	Kabupaten Barito Selatan	1.455	48	38	3	13	7	6	154
9	Kabupaten Barito Utara	484	23	59	44	21	16	54	153
10	Kabupaten Murung Raya	416	12	43	1	18	4	25	72
11	Kabupaten	1.735	251	5.170	0	9	0	5	322

	Seruyan								
12	Kabupaten Ktw. Barat	1.185	190	104	1	81	16	21	244
13	Kabupaten Lamandau	1.453	103	930	2	21	1	4	148
14	Kabupaten Sukamara	327	134	376	4	23	1	12	59
	Jumlah	17.527	1.253	8.489	66	251	84	327	2.898

Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2014 tentang pemberian ijin usaha mikro kecil dan permedagri no 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian ijin usaha mikro dan kecil.

Data UMKM yang sudah memiliki ijin usaha sbb ;

Jumlah UMKM yang sudah Memiliki Ijin Usaha
Berdasarkan Kualifikasi Usaha Tahun 2016

NO	Uraian	Ijin Usaha	Kualifikasi Usaha			Jumlah UMKM
			Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kota Palangka Raya	1.466	5.763	806	81	6.650
2	Kabupaten Kapuas	36	134	16	0	150
3	Kabupaten Pulang Pisau	51	225	36	0	261
4	Kabupaten Katingan	182	1.847	50	0	1.897
5	Kabupaten Ktw. Timur	86	1.095	101	1	1.197
6	Kabupaten Gunung Mas	0	2.755	369	1	3.125
7	Kabupaten Barito Timur	323	1.636	15	1	1.652
8	Kabupaten Barito Selatan	507	1.542	181	1	1.724

9	Kabupaten Barito Utara	153	579	145	130	854
10	Kabupaten Murung Raya	23	575	15	1	591
11	Kabupaten Seruyan	68	7.313	177	2	7.492
12	Kabupaten Ktw. Barat	144	1.713	113	16	1.842
13	Kabupaten Lamandau	10	2.439	211	12	2.662
14	Kabupaten Sukamara	49	899	36	1	936
JUMLAH IJIN USAHA		2.883	17.632	1.919	244	31.033

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha dan sistem insentif yang menstimulan masyarakat untuk merealisasikan membuka usaha baru. Dengan adanya data memudahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merancang program yang dibutuhkan wirausaha baru di setiap kabupaten/kota, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

g. Sasaran 7 :

Meningkatkan promosi/publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran luar dan dalam daerah.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil produk unggulan daerah – daerah yang di miliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal masyarakat luas sekaligus

mempromosikan ciri khas daerah serta Pencapaian sasaran ini diupayakan juga untuk meningkatkan jumlah promosi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan upaya dilakukannya melalui promosi dan pameran hasil produk unggulan daerah Kalimantan Tengah ditingkat pusat maupun daerah pada Pameran yang dilaksanakan didalam maupun diluar daerah yang diikuti oleh 24 Koperasi dan UMKM dari kabupaten/kota binaan.

h. Sasaran 8 :

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pembina dalam Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para Pengelola/Pengurus Koperasi dalam Mengelola Manajemen KSP/USP Koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP koperasi, Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang Mengikuti Diklat

Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui DIKLAT Akuntansi Koperasi bagi Aparatur/Pembina, sehingga mampu membina koperasi dimana target 30 orang yang mengikuti 30 Orang memenuhi target yang diinginkan 100%. Dimamna beberapa kegiatan diantaranya DIKLAT Perkoperasian bagi Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Se Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian sesuai dengan jatidiri koperasi, Diklat Pengembangan Usaha Koperasi untuk meningkatkan pemahaman positif masyarakat tentang perkoperasian. Penyusunan Laporan Keuangan untuk pengurus koperasi agar koperasi yang mereka bina secara administrasi berjalan dengan baik.

B. ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM-Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. APBD

Secara keseluruhan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 melalui dana APBD dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung (BTL) pada Tahun anggaran 2016, sebesar

Rp. 6.851.479.316,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.459.014.406 ,- (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) atau (94,27%) sisa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 392.464.910,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau (5.73%).

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung (BL) pada Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 6.381.014.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Rupiah) realisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.960.404.737 ,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau (93,41%) sisa anggaran Rp. 420.609.363,- (Empat

Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rib) atau (6,83%). Laporan keuangan secara lengkap yang rinci menurut kegiatan untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.180.000	15.180.000	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	286.800.000	208.963.687	72.86
3.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12.327.500	12.327.500	100
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.900.000	5.706.800	72.24
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	640.014.000	635.354.000	99.27
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000	90.000.000	100
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.250.000	8.250.000	100
8.	Penyediaan alat tulis kantor	95.113.500	95.113.500	100
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.994.000	43.994.000	100
10.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000	25.000.000	100
11.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	226.976.000	226.976.000	100
12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	100
13.	Penyediaan makanan dan minuman	4.620.000	4.235.000	91.67

14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.542.600	69.917.200	99.11
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	104.527.420	104.030.000	99.52
16.	Rujukan Berobat PNS	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0	0
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.945.000	70.868.000	99.89
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.175.000	75.164.000	99.99
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000	35.000.000	100
Program peningkatan Disiplin Aparatur				
1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	59.290.000	59.290.000	100
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	64.810.000	64.797.500	99.98
2.	Penyusunan RKA-SKPD	54.428.000	53.041.000	97.45
3.	Penyusunan Renja SKPD	22.063.000	22.060.000	99.99
4.	Penyusunan Renstra pemberdayaan UMKM	111.192.600	111.012.600	99.84
Program penguatan kelembagaan koperasi				
1.	Penataan dan monitoring kelembagaan koperasi	207.598.000	199.520.000	96.11
2.	Penilaian koperasi berprestasi	122.780.000	118.470.000	96.49
3.	Tangkas terampil koperasi	133.150.000	129.502.000	97.26
4.	Pemeringkatan koperasi	0	0	0
5.	Penyuluhan perkoperasian di wilayah PM2L	232.630.880	213.205.000	91.65

6.	Pembuatan Leaflet Perkoperasian	0	0	0
7.	Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi	79.665.000	73.745.000	92.57
8.	Sosialisasi PM2L	61.616.000	61.616.000	100
9.	Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi	0	0	0
10.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Pangan	0	0	0
11.	Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi	65.000.000	62.203.000	95.70
12.	Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan	75.300.000	69.300.000	92.03
13.	Peningkatan Kelembagaan Koperasi Melalui RAT	14.150.000	14.150.000	100
14.	Pengembangan Koperasi Nelayan/Masyarakat Pesisir	0	0	0
Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM				
1.	Koordinasi perencanaan penyusunan program/pemberdayaan koperasi dan UMKM	115.745.000	115.445.000	99.74
2.	Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM	0	0	0
3.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi di desa/kelurahan PM2L	0	0	0
4.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan permodalan	0	0	0
5.	Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM	0	0	0
6.	Pemetaan UMKM	0	0	0

7.	Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan usaha	20.550.000	20.550.000	100
Program Peningkatan Akses terhadap sumber daya produktif				
1.	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM	0	0	0
2.	Pendampingan UMKM Melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	81.520.000	62.325.000	76.45
3.	Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi			
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM				
1.	Pameran Kalimantan Tengah Expo	105.934.000	98.434.000	92.92
2.	Pasar rakyat	65.528.000	65.498.000	99.95
3.	Pameran luar daerah	134.850.000	122.298.000	90.69
4.	Pameran dalam daerah	0	0	0
Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM				
1.	DIKLAT Perkoperasian	0	0	0
2.	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan KSP/USP-Koperasi	62.500.000	61.750.000	98.80
3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah (DAK Non-Fisik)	2.000.000.000	1.759.894.950	87.99
Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM				
1.	Promosi dan Publikasi UMKM	0	0	0
2.	Peningkatan Peran UMK Dalam Pengembangan Usaha	583.980.000	582.460.000	99.74
3.	Informasi UMKM	45.600.000	45.600.000	100
4.	Temu Kemitraan UMKM	0	0	0
JUMLAH		6.381.014.000	5.960.404.737	93.41

2. APBN

Secara keseluruhan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 melalui dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 3.218.520.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.180.049.000,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau (98.80%) dan sisa anggaran Rp.855.300.000,-(Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) (5,6%).

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum gambaran hasil pengukuran kinerja dapat menunjukkan bahwa pada Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan kebijakan dengan program pemberdayaan KUKM dalam kerangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Keberhasilan pencapaiannya dapat dikatakan cukup signifikan, meski masih terdapat beberapa pencapaian sasaran yang belum optimal. Adapun strategi untuk mengatasi pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kinerja Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, agar optimal dalam melakukan pembinaan terutama terhadap koperasi yang tidak aktif serta koperasi yang belum melaksanakan RAT tidak tepat waktu.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat/publik dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif.
6. Meningkatkan akses permodalan.
7. Meningkatkan kualitas SDM.
8. Meningkatkan jiwa kewirausahaan.
9. Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha
10. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM selaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Kemudahan perijinan bagi wirausaha baru serta perijinan untuk membangun fasilitas usaha bersama.
11. Mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi.
12. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan gerakan nasional untuk memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan kepada masyarakat terutama pelajar, mahasiswa dan gerakan muda serta kelompok professional, dalam rangka membangun apresiasi yang positif dari masyarakat bagi kewirausahaan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sangat menyadari bahwa kinerja instansi yang berbasis pada orientasi hasil adalah suatu keharusan untuk diwujudkan. Berpijak dari evaluasi akuntabilitas pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berupaya menyempurnakan dan memperkuat system akuntabilitas kinerja yang ada, guna mewujudkan pencapaian tata pemerintahan yang baik. Di dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah secara transparan dan akuntabel berupaya menjabarkan capaian-capaian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan IKU, sasaran strategis dan indikator strategis dalam Renstra.

Data Tahun Anggaran 2016 yang diambil dari Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) maka ditetapkan rencana dan realisasi dari masing-masing kegiatan dengan melihat indikator kinerja yang ditetapkan. Atas perbandingan rencana tingkat capaian (target) dan realisasi maka diperoleh nilai persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing program sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2016 dengan rencana strategis (RS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terdapat 5 (lima) program yaitu :

1. Program penguatan kelembagaan koperasi

2. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
3. Program peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif
4. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
5. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Seluruh sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Renstra pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik.

B. SARAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk Tahun 2016.

Target ini tertuang dalam dokumen rencana kinerja tahun 2016, yang merupakan rangkaian dari upaya pencapaian sasaran dalam renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021. Penyusunan rencana kinerja tersebut dilakukan dan diselaraskan dengan penyusunan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja dalam kurun waktu tersebut. Berkaitan dengan tersebut, dalam rangka mensukseskan pembangunan khususnya dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah perlu dukungan kongkrit dan berbagai pihak terutama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se Kalimantan Tengah selaku ujung tombak dilapangan dalam pembinaan Koperasi dan UMKM.

Sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan berbagai kalangan stakeholder harus terus tingkatkan dan berkesinambungan terutama dalam dukungan anggaran yang memadai, sehingga tingkat capaian target yang disusun Renstra dapat tercapai.

Palangka Raya, 01 Pebruari 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Drs. HENKY MANGKIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19630913 198812 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas	• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	100
		• Jumlah Koperasi aktif	Koperasi	1.610
		• Jumlah Terbentuknya Koperasi	Koperasi	12
			Kelompok Tani	12
		• Jumlah Kab/kota dan Desa/Kelurahan yang mendapat penyuluhan perkoperasian	Desa/Kelurahan	39
			Kabupaten/Kota	14
		• Berkembang dan Tumbuhnya koperasi di wilayah pesisir/ Masyarakat Nelayan	Orang	20
2.	Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi dan kinerja koperasi serta berdaya saing usaha sesuai jati dirinya	• Jumlah Koperasi Aktif yang berprestasi	Koperasi	12
		• Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT(Rapat Anggota Tahunan)	Koperasi	340
3.	Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	• Jumlah Peserta tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	Orang	42
4.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi para Pengelola kelompok	• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di	Orang	30

	usaha ekonomi produktif Perempuan dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang perkoperasian	Bidang Perkoperasian • Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya	Orang	30
5.	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahanya	• Jumlah koperasi dan UKM yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan usahanya	Koperasi dan UMKM	50
			Unit	4
6.	Meningkatnya kemampuan UMK sebagai para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan Usahanya	• Jumlah UMK yang mengembangkan usahanya	UMK	12
			Orang	42
7.	Meningkatnya promosi / publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah	• Jumlah UMKM yang mengikuti pameran luar daerah	KUMKM	5
		• Jumlah UMKM yang mengikuti pameran dalam daerah	KUMKM	5
		• Jumlah lokasi pasar rakyat	Lokasi	1
		• Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran Kalteng Expo	KUMKM	8
8.	Meningkatnya kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan laporan keuangan Koperasi,	• Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kemampuan, pengetahuan dalam	Orang	455

	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para pengelola / pengurus Koperasi dalam mengelola Manajemen KSP/ USP Koperasi, Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan para Aparatur pembina koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP Koperasi, Meningkatkan jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat	mengembangkan usahanya		
		• Jumlah pengelola / pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP koperasi	Orang	30
		• Jumlah pengelola koperasi yang paham tentang perkoperasian	Orang	84
9.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil	• Jumlah UMKM Penerima Bantuan Peralatan dan Sarana Usaha dalam Mengembangkan Usahanya	Unit	59

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas	• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	100
		• Jumlah Koperasi aktif	Koperasi	1.610
		• Jumlah Terbentuknya Koperasi	Koperasi	12
			Kelompok Tani	12
		• Jumlah Kab/kota dan Desa/Kelurahan yang mendapat penyuluhan perkoperasian	Desa/Kelurahan	39
			Kabupaten/Kota	14
		• Berkembang dan Tumbuhnya koperasi di wilayah pesisir/ Masyarakat Nelayan	Orang	20
2.	Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi dan kinerja koperasi serta berdaya saing usaha sesuai jati dirinya	• Jumlah Koperasi Aktif yang berprestasi	Koperasi	12
		• Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT(Rapat Anggota Tahunan)	Koperasi	340
3.	Terlaksananya lomba tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	• Jumlah Peserta tangkas terampil Tk. Provinsi dan Nasional	Orang	42
4.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi para	• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Orang	30

	Pengelola kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya serta meningkatnya keterampilan di bidang perkoperasian	Perempuan di Bidang Perkoperasian		
		• Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya	Orang	30
5.	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMK dalam Melakukan Pengembangan Usahanya	• Jumlah koperasi dan UKM yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan usahanya	Koperasi dan UMK	50
			Unit	4
6.	Meningkatnya kemampuan UMK sebagai para pelaku usaha UMK dalam mengembangkan Usahanya	• Jumlah UMK yang mengembangkan usahanya	UMK	12
			Orang	42
7.	Meningkatnya promosi / publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran keluar daerah dan dalam daerah	• Jumlah UMK yang mengikuti pameran luar daerah	KUMKM	5
		• Jumlah UMK yang mengikuti pameran dalam daerah	KUMKM	5
		• Jumlah lokasi pasar rakyat	Lokasi	1
		• Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran Kalteng Expo	KUMKM	8
8.	Meningkatnya kemampuan aparatur pembina dalam tatacara penyusunan laporan keuangan	• Jumlah koperasi dan UMK yang meningkat kemampuan, pengetahuan	Orang	455

	Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para pengelola / pengurus Koperasi dalam mengelola Manajemen KSP/ USP Koperasi, Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan para Aparatur pembina koperasi dalam Penilaian Terhadap Kesehatan KSP/USP Koperasi, Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat	dalam mengembangkan usahanya		
		• Jumlah pengelola / pengurus koperasi dalam mengelola manajemen KSP/USP koperasi	Orang	30
		• Jumlah pengelola koperasi yang paham tentang perkoperasian	Orang	84
9.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil	• Jumlah UMKM Penerima Bantuan Peralatan dan Sarana Usaha dalam Mengembangkan Usahanya	Unit	59